

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai di masa depan. Visi Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah:

“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”

Makna dan arti kata yang tersebut dalam Visi di atas adalah:

| Pokok-pokok Visi | Penjelasan Visi |
|-------------------------|--|
| Kota Cerdas | Mengandung makna bahwa prinsip yang dikedepankan dan menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas, yang mencerminkan konsepsistematis, efisiensi, efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun <i>smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living</i> dan <i>smart governance</i> . Upaya dalam mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin akan memaksimalkan manfaat aspek teknologi dan inovasi. |
| Kota Berkualitas | Memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan oleh semua <i>stakeholder</i> yang ada di wilayah adalah sebuah standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek. Sumberdaya manusia yang kompeten, kondisi infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan, lingkungan yang ditata dengan mengedepankan prinsip berkesinambungan dan mendukung produktifitas warga, penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan kaidah-kaidah <i>good governance</i> , dan kehidupan sosial masyarakat yang madani dan mencerahkan, adalah batasan kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai standar tersebut konsep pembangunan berbasis kewilayahan, inovasi dankolaborasi dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan. |
| | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Kota Berdaya Saing | Membawa pesan bahwa yang ingin dituju adalah sebuah kota yang memiliki berbagai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini diterjemahkan melalui penyediaan transportasi publik yang baik, kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang, serta mekanisme pelayanan perijinan yang mencerminkan prinsip <i>excellent service delivery</i> . Inovasi adalah pintu utama untuk mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih dan berdaya saing. |
| Berbasis Teknologi dan Inovasi | Untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya saing diupayakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan system sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. |

Misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 yang merupakan gambaran mengenai cara bagaimana visi akan dicapai. Misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 selengkapny adalah sebagai berikut:

- 1 Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
- 2 Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
- 3 Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
- 4 Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
- 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

| No | Misi | Tujuan | Sasaran | |
|----|---|--|---------|--|
| 1 | Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing | Mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya . | 1.1 | Meningkatnya partisipasi dan mutu pendidikan dasar |
| | | | 1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| | | | 1.3 | Meningkatnya kualitas angkatan kerja |
| | | | 1.4 | Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk |



| No | Misi | Tujuan | Sasaran |
|----|---|---|---|
| | | | 1.5 Meningkatkan pengarusutamaan gender |
| 2 | Meningkatkan Infrastruktur kota yang fungsional | Meningkatkan aksesibilitas transportasi dan infrastruktur kota yang lebih fungsional. | 2.1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah |
| | | | 2.2 Meningkatnya transportasi wilayah yang optimal |
| 3 | Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan | Meningkatkan sarana dan prasarana kota layak huni berwawasan lingkungan. | 3.1 Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan |
| | | | 3.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |
| | | | 3.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan |
| 4 | Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan | Menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan. | 4.1 Meningkatnya investasi |
| | | | 4.2 Meningkatnya perekonomian perkotaan |
| | | | 4.3 Meningkatnya produk unggulan daerah |
| 5 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. | Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel. | 5.1 Meningkatnya konsistensi perencanaan penganggaran dan pembangunan |
| | | | 5.2 Meningkatnya pelayanan publik |
| | | | 5.3 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah |
| | | | 5.4 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah |

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

B.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, meliputi:

| No | Sasaran | Strategi |
|--|--|--|
| Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya | | |
| 1 | Meningkatnya partisipasi dan mutu pendidikan dasar | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akselerasi penyelenggaraan pendidikan di kecamatan yang angka partisipasi pendidikannya masih rendah• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan• Menyiapkan formasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan• Menguatkan dan mengembangkan pendidikan non formal dan informal |
| 2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat• Meningkatkan apresiasi terhadap pelaku/atlet olahraga disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang memadai |
| 3 | Meningkatnya kualitas angkatan kerja | <ul style="list-style-type: none">• Memperluas lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausaha baru• Meningkatkan peran serta kepemudaan |
| 4 | Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk | <ul style="list-style-type: none">• Mendorong keluarga mandiri dan sejahtera |
| 5 | Meningkatnya pengarusutamaan gender | <ul style="list-style-type: none">• Mendorong peran perempuan untuk lebih aktif dalam pembangunan |
| Tujuan 2 : Meningkatkan aksesibilitas transportasi dan infrastruktur kota yang lebih fungsional | | |
| 6 | Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kapasitas dan kualitas untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah dan energi guna mendukung kegiatan perekonomian dan layanan pemerintahan• Meningkatkan pengelolaan infrastruktur pemukiman, sumberdaya air dan lingkungan sehat• Meningkatkan rasio saluran drainase dan trotoar yang berkualitas• Mengupayakan pencegahan dan pengendalian banjir secara efektif dengan mengintegrasikan kegiatan konservasi, pendayagunaan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| No | Sasaran | Strategi |
|--|---|---|
| 7 | Meningkatnya transportasi wilayah yang optimal | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan transportasi umum yang aman dan memadai• Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat |
| Tujuan 3: Meningkatkan sarana dan prasarana kota layak huni berwawasan lingkungan | | |
| 8 | Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pengelolaan persampahan, dengan kebijakan yang diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sampah |
| 9 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan kerangka regulasi penataan ruang dan data spasial• Mewujudkan ruang-ruang publik yang mendorong aktivitas dan kreatifitas masyarakat. |
| 10 | Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pemanfaatan SDA, lingkungan dan energi yang seimbang dan berkelanjutan• Mendorong aparatur dan swadaya masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban lingkungan dan penanggulangan bencana• Melakukan pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat |
| Tujuan 4 : Menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan | | |
| 11 | Meningkatnya investasi | <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaborasi pendanaan pembangunan |
| 12 | Meningkatnya perekonomian perkotaan | <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan dan mengaktifkan UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya• Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi local• Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha |
| 13 | Meningkatnya produk unggulan daerah | <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya |
| Tujuan 5 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan refromasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel | | |
| 14 | Meningkatnya konsistensi perencanaan penganggaran dan pembangunan | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan |
| 15 | Meningkatnya pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kinerja dan efektifitas pelayanan publik pemerintah daerah |
| 16 | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi anggaran daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi |
| 17 | Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kapasitas sistem dan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan diimbangi dengan optimalisasi sistem dan manajemen tata kelola pemerintahan• Membangun layanan yang ramah dan menarik dengan |

| No | Sasaran | Strategi |
|----|---------|--|
| | | <p>pengembangan sistem informasi disemua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik menuju cyber city</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memelihara Rutin/Berkala sarana/prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan |

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

B.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi pembangunan daerah, disusun arah kebijakan daerah yang dijabarkan melalui arah kebijakan dan program berdasarkan pada Misi 1 sampai dengan Misi 5, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

| No | Arah Kebijakan | Program |
|--|---|---|
| Misi 1 :Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing | | |
| 1 | • Meningkatkan pendidikan non-formal | • PAUD dan Pendidikan Non Formal |
| | • Meningkatkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dua belas Tahun | • Pendidikan Sekolah Dasar • Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| | • Meningkatkan pengelolaan pelayanan dan mutu pendidikan | • Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan |
| | • Meningkatkan kualitas informasi dan budaya baca | • Pengembangan budaya baca |
| 2 | • Mengembangkan mutu pelayanan kesehatan | • Pengembangan pelayanan kesehatan |
| | • Mengembangkan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan puskesmas | • Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan |
| | • Penyediaan dan pengawasan perbekalan kesehatan | • Penyediaan dan pengawasan obat , makanan dan perbekalan kesehatan |
| | • Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak, remaja dan lansia. | • Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga |
| | • Meningkatkan kualitas gizi masyarakat | • Program perbaikan gizi masyarakat |
| | • Memberdayakan masyarakat agar hidup sehat | • Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat |
| | • Mengembangkan sumber daya manusia kesehatan | • Pengembangan SDM kesehatan |
| | • Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, komplementer dan penanggulangan penyakit menular-tidak menular | • Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer |
| | • Meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit | • Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD |



| No | Arah Kebijakan | Program |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengelolaan infrastruktur pemukiman, sumberdaya air dan lingkungan sehat | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat |
| | <ul style="list-style-type: none"> Membina dan memasyarakatkan olahraga | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan manajemen dan pemasyarakatan olahraga |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan prasarana olahraga |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan produkyifitas, kesempatan dan lembaga ketenaga kerjaan | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Kerjasama Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran serta kepemudaan | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan peran serta kepemudaan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Membina masyarakat dalam menciptakan keluarga sejahtera dan mandiri | <ul style="list-style-type: none"> Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan kepada perempuan dan anak | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak |
| | <ul style="list-style-type: none"> Menguatkan lembaga PUG dan Anak | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak |
| Misi 2 :Meningkatkan Infrastruktur kota yang fungsional | | |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan dan jembatan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | <ul style="list-style-type: none"> Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah |
| | <ul style="list-style-type: none"> Menata lingkungan terpadu permukiman | <ul style="list-style-type: none"> Penataan Lingkungan Terpadu |
| | <ul style="list-style-type: none"> Menciptakan lingkungan sehat perumahan | <ul style="list-style-type: none"> Lingkungan Sehat Perumahan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan infrastruktur permukiman | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur permukiman Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman Pengembangan Penyediaan dan Pengelolaan PJU |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mengelola air bersih dan air limbah | <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sarana air bersih dan air limbah |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mencegah dan Menangani | <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian banjir |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mengelola dan mengkonversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber daya air lainnya |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan layanan angkutan | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pelayanan angkutan |



| No | Arah Kebijakan | Program |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Mengendalikan dan mengamankan lalu lintas | <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Membangun sarana prasarana perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Transportasi Masal | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Transportasi Masal |
| Misi 3 :Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan | | |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan teknologi pengolahan sampah | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pengelolaan persampahan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Fasilitas Pengangkut Sampah dan Sosialisasi pengurangan volume dari sumber sampah | <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Sampah terpadu |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau | <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan RTH |
| | <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan Tata Ruang Kota | <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Tata Ruang |
| | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan, pengendalian dan memanfaatkan Ruang sesuai Tata Ruang | <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dan pemanfaatan ruang |
| | <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mengendalikan Pencemaran ,Perusakan Lingkungan Hidup dan pengelolaan mutu laboratorium LH | <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup |
| | <ul style="list-style-type: none"> Melindungi dan mengkonservasi Sumber Daya Alam | <ul style="list-style-type: none"> Perlindungan dan konservasi sumber daya alam |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup |
| | <ul style="list-style-type: none"> Memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota | <ul style="list-style-type: none"> Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pencegahan bahaya kebakaran | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektifitas tanggap darurat dan mitigasi menghadapi bencana | <ul style="list-style-type: none"> Penanggulangan Bencana Daerah |
| | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pendidikan politik masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan politik masyarakat |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan wawasan kebangsaan | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan wawasan kebangsaan |
| Misi 4 :Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan | | |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerjasama | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan investasi |
| | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan kualitas pelayanan perijinan yang bermutu | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pelayanan Perijinan |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kelembagaan, iklim usaha dan kewirausahaan koperasi | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Koperasi Pengembangan UMKM |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan IKM dan koperasi | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Industri |
| | <ul style="list-style-type: none"> Melindungi konsumen dan mengamankan perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan |



| No | Arah Kebijakan | Program |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Membina pedagang kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ekspor | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pengembangan Ekspor |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketahanan pangan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ketahanan Pangan • Pengembangan Perikanan • Pengembangan pertanian • Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar | <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Jaminan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan dan Jaminan Sosial |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kesejahteraan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Memberdayakan kelembagaan kesejahteraan sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peran serta, lembaga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kemitraan untuk mendukung pengembangan MICE | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Ekonomi Kreatif |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | <ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan Pemasaran Pariwisata |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan mengelola Kebudayaan | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pengelolaan kebudayaan |
| Misi 5 :Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. | | |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Menata Kelembagaan dan Tata Kerja Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan dan tata kerja organisasi pemerintah daerah |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama pembangunan dan kewilayahan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Menata peraturan perundang-undangan serta menerbitkan regulasi dan menyelaraskan peraturan-peraturan di daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Penataan peraturan perundang-undangan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Melayani Bantuan Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan DPRD | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan • Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Meneliti dan mengembangkan daerah serta melakukan koordinasi di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH) | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akuntabilitas kinerja instansi |



| No | Arah Kebijakan | Program |
|----|---|---|
| | pemerintahan | pemerintahan |
| | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran | <ul style="list-style-type: none">• Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran |
| | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pengelolaan keuangan daerah |
| | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah |
| | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah | <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | <ul style="list-style-type: none">• Membina dan mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur |
| | <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan Manajemen Kepegawaian | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Manajemen Kepegawaian |
| | <ul style="list-style-type: none">• Penguatan sistem tata kelola pemerintahan | <ul style="list-style-type: none">• Manajemen Perubahan• Penguatan tata laksana |
| | <ul style="list-style-type: none">• Menata Administrasi Kependudukan | <ul style="list-style-type: none">• Penataan Administrasi Kependudukan• Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik |
| | <ul style="list-style-type: none">• Informasi wilayah yang terintegrasi | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pemetaan Wilayah• Pengembangan data dan informasi |
| | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Peran Kecamatan dan Kelurahan | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan |
| | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Komunikasi dan Mengembangkan Informasi dan Media Massa | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa |
| | <ul style="list-style-type: none">• | <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi Sistem Persandian |
| | <ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan pemanfaatan TI | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Teknologi dan Informasi |
| | <ul style="list-style-type: none">• Memelihara Rutin/Berkala sarana/prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan, Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan• Pelayanan Kearsipan |

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

C. PRIORITAS DAERAH

Prioritas program pembangunan 2016-2021 dalam rangka menunjang pencapaian sasaran, tujuan terhadap visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 yang terdiri dari rencana pembangunan, pengembangan dan peningkatan yang sudah masuk ke dalam 108 program yang telah disusun. Berikut merupakan matrik Prioritas Program Pembangunan 2016-2021.

Tabel 2.3 Matriks Prioritas Program Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|----------|---|--|-----------------------------------|
| | A | URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | |
| Urusan Pendidikan | 1 | PAUD dan Pendidikan Non Formal | Harapan Lama Sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | APM PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Urusan Pendidikan | 2 | Pendidikan Sekolah Dasar | APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Urusan Pendidikan | 3 | Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Urusan Pendidikan | 4 | Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan | Uji Kompetensi Guru | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Urusan Kesehatan | 5 | Pengembangan pelayanan kesehatan | Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase akreditasi unit Labkesda | Dinas Kesehatan |
| | | | Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit | Rumah Sakit Umum |
| Urusan Kesehatan | 6 | Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan | Persentase alat kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Jumlah puskesmas yang terbangun | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah bangunan posyandu yang dibangun | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah bangunan puskesmas yang dikembangkan | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah Bangunan PPKT | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Persentase Gudang terbangun | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah Rumah Sakit Tingkat Kecamatan dibangun | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah Puskesmas yang | Dinas Bangunan dan |



| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|------------------|----|---|--|----------------------|
| | | | direhabilitasi | Penataan Ruang |
| | | | Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit | Rumah Sakit Umum |
| Urusan Kesehatan | 7 | Penyediaan dan pengawasan obat , makanan dan perbekalan kesehatan | Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase resep sesuai dengan formularium | Rumah Sakit Umum |
| Urusan Kesehatan | 8 | Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | Dinas Kesehatan |
| | | | Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan pelayanan lansia | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan remaja | Dinas Kesehatan |
| Urusan Kesehatan | 9 | Program perbaikan gizi masyarakat | Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase Remaja putri yang mendapat TTD | Dinas Kesehatan |
| Urusan Kesehatan | 10 | Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit | Rumah Sakit Umum |
| Urusan Kesehatan | 11 | Pengembangan SDM kesehatan | Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase SDM | Rumah Sakit Umum |



| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|------------------|----|---|--|----------------------|
| | | | Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun | |
| Urusan Kesehatan | 12 | Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular | Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direpson | Dinas Kesehatan |
| Urusan Kesehatan | 13 | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer | Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer | Dinas Kesehatan |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--|----|--|---|-----------------------------------|
| Urusan Kesehatan | 14 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD | Jumlah puskesmas BLUD | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase kepuasan pasien yang disurvei | Rumah Sakit Umum |
| Urusan Kesehatan | 15 | Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat | Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar | Rumah Sakit Umum |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 16 | Pembangunan jalan dan jembatan | Jalan dan jembatan dalam kondisi baik | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | | Jalan lingkungan dalam kondisi baik | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | | Pedestrian jalan yang dibangun | Dinas Pekerjaan Umum |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 17 | Pengendalian banjir | luas genangan yang tereduksi | Dinas Pekerjaan Umum |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 18 | Pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber daya air lainnya | Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | | Kapasitas debit sungai /tandon | Dinas Pekerjaan Umum |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 19 | Perencanaan Tata Ruang | Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah | Bappeda |
| | | | Tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang beserta rencana teknisnya melalui peta analog dan | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--|----|--|--|--|
| | | | peta digital | |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 20 | Pengelolaan sarana air minum dan air limbah | persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Persentase pelayanan air minum | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 21 | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung | Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Tersedianya sarana dan prasarana gedung non perkantoran | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Terlayannya masyarakat dalam pengurusan kajian dan rekomendasi teknis serta sertifikat laik fungsi | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 22 | Pengendalian dan pemanfaatan ruang | Terlayannya masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 23 | Penataan Lingkungan Terpadu | Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha) | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Terbangunnya sarana penunjang permukiman | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Penyediaan rumah susun sederhana sewa (unit) | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Rumah tidak layak huni menjadi layak huni | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 24 | Pengembangan infrastruktur permukiman | Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Tersedianya data rumah dan perumahan | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Persentase terlayannya masyarakat dalam | Dinas Perumahan, Permukiman dan |



| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|----|---|--|--|
| | | | pengurusan pengesahan pertelaan rumah susun | Pertanahan |
| | | | Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 25 | Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman | Pengembangan dan Pembangunan TPU | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Terpeliharanya sarana TPU | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Pembinaan kelembagaan pengelolaan TPU | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 26 | Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU | Penambahan jumlah PJU terbangun | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 27 | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran | Respon time kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 28 | Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 20 Menit terhadap Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|----|---|--|-----------------------|
| Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 29 | Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota | Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal | Satpol PP |
| Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 30 | Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat | Satpol PP |
| | | | Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban | Satpol PP |
| | | | Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang | Satpol PP |
| | | | Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih | Satpol PP |
| Urusan Sosial | 31 | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar | Dinas Sosial |
| Urusan Sosial | 32 | Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan | Dinas Sosial |
| | | | Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan | Setda |
| | | | Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Setda |
| | | | Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS | Setda |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | |
| Urusan Ketenagakerjaan | 33 | Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja siap pakai | Dinas Ketenagakerjaan |
| Urusan Ketenagakerjaan | 34 | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Dinas Ketenagakerjaan |
| Urusan Ketenagakerjaan | 35 | Kerjasama Hubungan Industrial dan | Menurunnya Angka perselisihan Industrial | Dinas Ketenagakerjaan |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|----|---|--|---|
| n | | Perlindungan Ketenagakerjaan | | |
| Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 36 | Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan | DPMPPPAKB |
| Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 37 | Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas | DPMPPPAKB |
| Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 38 | Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak | IPG dan IDG | DPMPPPAKB |
| | | | Jumlah Kelurahan Ramah Anak | DPMPPPAKB |
| Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 39 | Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan | Pemanfaatan Inovasi TTG Dalam Pemberdayaan Masyarakat | DPMPPPAKB |
| | | | Persentase Peran serta Lembaga/Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan | DPMPPPAKB |
| Urusan Pangan | 40 | Peningkatan Ketahanan Pangan | Penguatan cadangan pangan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | | | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | | | AKG dan AKP | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | | | Keamanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | | | Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Urusan Pertanahan | 41 | Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Tersusunnya laporan kebutuhan lahan | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Terfasilitasinya dan pendampingan kegiatan | Dinas Perumahan, Permukiman dan |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--------|----|---------|---|--|
| | | | pengadaan tanah untuk pembangunan | Pertanahan |
| | | | Terlaksananya pengadaan tanah untuk : kantor kelurahan, kawasan pertanian terpadu, dan Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Terlaksananya pengadaan tanah untuk : Infrastruktur Dasar, Kawasan Perdagangan dan Lapangan Olah Raga | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar dan Non Gedung Perkantoran | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran/ fasilitas pemerintah bagi masyarakat dan Non Infrastruktur Dasar | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Tersusunnya dokumen teknis rencana | Dinas Perumahan, Permukiman dan |



| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------|----|--|--|--|
| | | | pengadaan tanah | Pertanahan |
| | | | Tersusunnya laporan kebutuhan lahan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Untuk Pembangunan | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi Tahapan Pengadaan Tanah | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Terfasilitasinya Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| Urusan Lingkungan Hidup | 42 | Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | persentase penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Pengendalian dan pengawasan terhadap B3 dan limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| Urusan Lingkungan Hidup | 43 | Perlindungan dan konservasi sumber daya alam | Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Pilot Project kampung iklim (kampung Hijau di 7 kecamatan) | Dinas Lingkungan Hidup |
| Urusan Lingkungan Hidup | 44 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup | Jumlah peningkatan partisipasi aktif masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Fasilitasi Peningkatan Nilai ADIPURA | Dinas Lingkungan Hidup |



| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|----|---|---|------------------------|
| | | | Jumlah penghargaan Nasional maupun lokal terkait pelestarian lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| Urusan Lingkungan Hidup | 45 | Pengembangan pengelolaan persampahan | Persentase pengangkutan sampah | Dinas Lingkungan Hidup |
| Urusan Lingkungan Hidup | 46 | Pengelolaan Sampah terpadu | Persentase pengurangan sampah melalui 3R | Dinas Lingkungan Hidup |
| Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 47 | Penataan Administrasi Kependudukan | Cakupan Penerbitan KK | Disdukcapil |
| | | | Cakupan penerbitan KTP | Disdukcapil |
| | | | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | Disdukcapil |
| | | | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian | Disdukcapil |
| | | | Rasio Pasangan Berakta Perkawinan | Disdukcapil |
| | | | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan | Disdukcapil |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia | Disdukcapil |
| Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 48 | Pengendalian Penduduk | Pengendalian Urbanisasi Penduduk | Disdukcapil |
| Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 49 | Keluarga Berencana | Proporsi Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 Tahun | DPMPPPAKB |
| | | | Menurunnya Unmet Need | DPMPPPAKB |
| | | | Meningkatnya Kesertaan ber- KB | DPMPPPAKB |
| | | | Meningkatnya Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Ber-KB | DPMPPPAKB |
| | | | Meningkatnya Produk Unggulan UPPKS | DPMPPPAKB |
| Urusan Perhubungan | 50 | Pengembangan pelayanan angkutan | Jumlah uji kir | Dinas Perhubungan |
| Urusan Perhubungan | 51 | Pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Jumlah titik pengendalian dan | Dinas Perhubungan |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------|----|---|--|----------------------------------|
| | | | pengaturan lalu lintas | |
| Urusan Perhubungan | 52 | Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan | Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi | Dinas Perhubungan |
| Urusan Perhubungan | 53 | Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas | Dinas Perhubungan |
| Urusan Komunikasi dan Informatika | 54 | Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa | Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Persentase Penyebaran Informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD | seluruh OPD |
| Urusan Koperasi dan UMKM | 55 | Pengembangan Koperasi | Jumlah SDM Koperasi yang dibina | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | Jumlah koperasi yang terfasilitasi | Dinas Koperasi dan UKM |
| Urusan Koperasi dan UMKM | 56 | Pengembangan UMKM | Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | Pembinaan wirausaha UMKM dan Calon Wirausaha UMKM | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | Pengawasan, Pengembangan Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | | |
| Urusan | 57 | Pembinaan pedagang | Jumlah Lokasi Penataan | Dinas Koperasi dan |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------|----|---|--|--|
| Koperasi dan UMKM | | kaki lima dan asongan | Pedagang Kaki Lima dan Asongan | UKM |
| | | | Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi | Dinas Koperasi dan UKM |
| Urusan Penanaman Modal Daerah | 58 | Pengembangan investasi | Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Urusan Penanaman Modal Daerah | 59 | Pengembangan Pelayanan Perijinan | Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | 60 | Pengembangan peran serta kepemudaan | Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan | Dispora |
| Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | 61 | Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | Jumlah Calon Wirausaha Muda | Dispora |
| Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | 62 | Pengembangan manajemen dan masyarakatan olahraga | Pembinaan Manajemen dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat | Dispora |
| Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | 63 | Pengembangan sarana dan prasarana olahraga | Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga | Dispora |
| | | | Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga | Dispora |
| Urusan Statistik | 64 | Pengembangan data dan informasi | Cakupan data dan informasi SKPD | seluruh OPD |
| | | | Ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan | Bappeda |
| Urusan Persandian | 65 | Optimalisasi Sistem Persandian | Cakupan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Cakupan Penyiapan, Pemanfaatan dan Pengembangan SDM Sandi, Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Urusan Kebudayaan | 66 | Pengembangan dan Pengelolaan kebudayaan | Jenis Budaya Yang Dilestarikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Urusan | 67 | Pengembangan budaya | Jumlah Pengunjung | Dinas Perpustakaan |



| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------|----------|---|--|---|
| Perpustakaan | | baca | Perpustakaan Tahunan | dan Arsip Daerah |
| | | | Jumlah Koleksi Bahan Pustaka | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| Urusan Kearsipan | 68 | Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan | Tertatanya arsip seluruh perangkat daerah dan unit kerja | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| | C | URUSAN PILIHAN | | |
| Urusan Kelautan dan Perikanan | 69 | Pengembangan Perikanan | Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Urusan Pariwisata | 70 | Pengembangan destinasi pariwisata | Jumlah PAD dari sektor pariwisata | Dinas Pariwisata |
| Urusan Pariwisata | 71 | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Dinas Pariwisata |
| Urusan Pertanian | 72 | Pengembangan pertanian | Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | | | Presentase Kesehatan Hewan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | | | Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Urusan Pertanian | 73 | Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu | Penambahan Sarana Prasarana Kawasan Pertanian Terpadu | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Urusan Perdagangan | 74 | Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Persentase Pengawasan Barang dan Jasa | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Stabilitas harga kebutuhan pokok | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Peningkatan Kesadaran Perijinan Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Jumlah UTTP yang diawasi | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Jumlah Rapat Koordinasi TPID dan Jumlah pendataan/pencacahan Indeks harga Konsumen | Setda |
| Urusan Perdagangan | 75 | Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Jumlah produk yang dipasarkan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Urusan Perindustrian | 76 | Pengembangan Industri | Cakupan binaan kelompok industri | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Cakupan binaan kelompok industri kreatif | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------|----------|--|--|--|
| | | | Jumlah pelaporan informasi industri | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | D | URUSAN PENUNJANG | | |
| Urusan Perencanaan | 77 | Pengembangan pemetaan Wilayah | Terwujudnya pengembangan peta wilayah | Setda |
| | | | Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pengembangan pemetaan wilayah | Setda |
| | | | Penegasan Batas Daerah/Kecamatan/Kelurahan | Setda |
| | | | Pembakuan Nama Rupabumi | Setda |
| | | | Cakupan pemetaan tematik wilayah sesuai kebutuhan SKPD | seluruh OPD |
| Urusan Perencanaan | 78 | Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan | Bappeda |
| | | | Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian program RPJMD | Bappeda |
| | | | Tersedianya dokumen evaluasi capaian SDG's | Bappeda |
| | | | Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian smart city | Bappeda |
| | | | Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan | seluruh OPD |
| Urusan Keuangan | 79 | Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah | Tersusunnya laporan neraca aset sesuai ketentuan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Urusan Keuangan | 80 | Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | Terealisasinya target pajak daerah | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendalian, pengelolaan keuangan dan pajak daerah | Badan Pendapatan Daerah |
| Urusan Keuangan | 81 | Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Tersusunnya dokumen Raperda APBD sesuai ketentuan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |



| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--|----|---|---|--|
| | | | Tersusunnya laporan pengendalian keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan | seluruh OPD |
| Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 82 | Pengembangan Manajemen Kepegawaian | Persentase ASN yang terlayani dalam data dan informasi manajemen ASN | BKPP |
| Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 83 | Pengembangan Sistem Manajemen sumber daya aparatur | Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD | seluruh OPD |
| | | | Tersedianya kebijakan tentang penataan SDM/ASN | Setda |
| Urusan Penelitian dan Pengembangan | 84 | Penelitian dan Pengembangan | Jumlah kajian penelitian dan pengembangan | Bappeda |
| | | | Jumlah koordinasi penelitian dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan | Bappeda |
| | | | Terwujudnya pengembangan inovasi daerah | Bappeda |
| Urusan Sekretariat DPRD | 85 | Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan | Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran | Sekretariat DPRD |
| | | | Persentase Fasilitasi Pembahasan Perda / Non Perda | Sekretariat DPRD |
| | | | Persentase Fasilitasi Fungsi Pengawasan | Sekretariat DPRD |
| Urusan Sekretariat Daerah | 86 | Penguatan Kelembagaan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah | Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah | Setda |
| Urusan Sekretariat Daerah | 87 | Kerjasama pembangunan dan kewilayahan | Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ekonomi Daerah | Setda |
| | | | Jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan BUMD dan BLUD | Setda |
| | | | Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat | Bappeda dan Setda |



| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--|-------|---|---|----------------------|
| Urusan Sekretariat Daerah | 88 | Penataan peraturan perundang-undangan | Program Pembentukan Peraturan Daerah | Setda |
| | | | Terlaksananya Pembahasan RAPERWAL antara SKPD pemrakarsa dengan Tim Asistensi Pembahasan RAPERWAL | Setda |
| | | | Harmonisasi dan Sinkronisasi RAKEPWAL | Setda |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah | Setda |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Daerah | Setda |
| | | | Terlaksananya Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan Daerah | Setda |
| | | | Terlaksananya program Pemerintah Pusat di Kota Tangerang Selatan | Setda |
| | | | Urusan Sekretariat Daerah | 89 |
| Terselenggaranya Sosialisasi dan Desiminasi RANHAM SKPD Kota Tangerang Selatan | Setda | | | |
| Terselenggaranya penyuluhan Hukum | Setda | | | |
| Tertanganinya perkara hukum di lingkungan pemerintahan | Setda | | | |
| Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum | Setda | | | |
| Urusan Sekretariat Daerah | 90 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi Internal dan Eksternal Serta Audiensi Dengan Masyarakat | Setda |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------|----|--|--|----------------------|
| Urusan Sekretariat Daerah | 91 | Manajemen Perubahan | Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur (ASN) | BKPP dan Setda |
| | | | Meningkatnya penerapan/internalisasi kodeetik dan Kode Prilaku dalam Penguatan Budaya Kerja | BKPP dan Setda |
| Urusan Inspektorat | 92 | Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan | Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | Inspektorat |
| | | | Prosentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Inspektorat |
| | | | Jumlah SKPD yang predikat sakin minimal B | Inspektorat |
| | | | Level Implementasi SPIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan | Inspektorat |
| | | | Level Implementasi SPIP SKPD | Inspektorat |
| | | | Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Inspektorat |
| | | | Prosentase Pejabat Yang melaporkan LHKPN | Inspektorat |
| | | | Prosentase ASN yang melaporkan LHKASN | Inspektorat |
| | | | Indeks Persepsi Korupsi | Inspektorat |
| | | | Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja bebas korupsi | Setda |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Setda |
| | | | Cakupan peran kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya | Seluruh Kecamatan |
| | | | Cakupan wilayah peningkatan kapasitas pemerintahan dan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan | Setda |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--|----------|--|--|-----------------------------------|
| Urusan Pemerintahan Umum | 94 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Capaian kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja | seluruh OPD |
| Urusan Pemerintahan Umum | 95 | Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik | Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di masing-masing SKPD | Setda dan seluruh OPD |
| Urusan Pemerintahan Umum | 96 | Penguatan tata laksana | Tersedianya SOP Teknis dan administrasi pemerintah | Setda |
| Urusan Pemerintahan Umum | 97 | Pendidikan politik masyarakat | Jumlah Pembinaan Politik Masyarakat | Kesbangpol |
| Urusan Pemerintahan Umum | 98 | Pengembangan wawasan kebangsaan | Jumlah Pembinaan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Toleransi Kerukunan dan Kerjasama antar Umat Beragama, Nilai-nilai religius, sosial dan solidaritas serta Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa | Kesbangpol |
| Urusan Sekretariat Umum | 99 | Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | seluruh OPD |
| | E | PROGRAM STRATEGIS KEWILAYAHAN | | |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung | Jumlah Pembangunan Comunity Center/komunitas kreatif skala kecamatan | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| Urusan Pendidikan | 100 | Pendidikan Sekolah Menengah Atas/SMK | Penambahan Ruang Kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khusus teknologi | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar terbangun | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| Urusan Kesehatan | | Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan | Bangunan RSUD (Gedung 3) | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| | | | Bangunan Gedung 2 RSUD Tangsel | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--|-----|--|---|--|
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung | Jumlah Gedung Perpustakaan Skala Kota dan Skala Kecamatan | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung | Bangunan Depo Arsip | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| Urusan Perhubungan | 101 | Peningkatan Transportasi Massal | Peningkatan sarana prasarana transportasi massal | Dinas Perhubungan |
| Urusan Pariwisata, Urusan Koperasi UKM, Urusan Perindustrian | 102 | Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon tangsel | Dinas Pariwisata, Dinkop UKM, Disperindag |
| Urusan Lingkungan Hidup | 103 | Pengelolaan RTH | Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Persentase taman terpelihara | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami | Dinas Lingkungan Hidup |
| Urusan Perdagangan | 104 | Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional | Jumlah kawasan perdagangan tradisional yang dikelola | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Jumlah Revitalisasi Pasar | Dinas Bangunan dan Penataan Ruang |
| Urusan Pangan | | Peningkatan Ketahanan Pangan | Manajemen Logistik | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Disperindag |
| Urusan Kesehatan | 105 | Pelayanan jaminan kesehatan nasional | Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN | Dinas Kesehatan |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 106 | Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong | Kapasitas Debit Saluran | Dinas Pekerjaan Umum |
| Urusan Komunikasi dan | 107 | Pengembangan Teknologi dan Informasi | Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika |



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

| URUSAN | NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------|-----------|---|--|----------------------------------|
| Informatika | | | Peningkatan Tata Kelola Teknologi dan Informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Peningkatan SDM Teknologi dan Informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Urusan Sosial | 108 | Bantuan dan Jaminan Sosial | Persentase Rumah Tangga/Individu Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| Urusan Pemerintahan Umum | | Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik | Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik | Seluruh Kecamatan |

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

